



# LKJIP

# 2023

KECAMATAN  
SANANWETAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen LKjIP secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan hasil kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja Kecamatan Sananwetan yang dihasilkan tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan Indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan 97%. Realisasi yang dicapai sebesar 98,63 %, yang berarti capainnya mencapai 101,68 %. Walaupun realisasi telah melebihi target, namun masih terdapat permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian di Kecamatan Sananwetan pada sasaran ini yaitu kurang optimalnya kompetensi petugas pelayanan.

**Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah, Indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan 75%. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %, yang berarti capainnya mencapai 133,33 %. Walaupun realisasi telah melebihi target, namun masih terdapat permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian di Kecamatan Sananwetan pada sasaran ini yaitu kurang optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan dan juga belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan, serta belum optimalnya koordinasi pembangunan wilayah.

**Sasaran 3** : Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan A (86,88). Realisasi yang dicapai sebesar A (85,13), yang berarti capainnya mencapai 97,99 %. permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian di Kecamatan Sananwetan pada sasaran ini yaitu belum sesuainya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pada Kecamatan Sananwetan. Juga, kecamatan Sananwetan belum memiliki Aplikasi atau alat pengumpulan Data Kinerja.

Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan dengan Indikator **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan** dengan Target Baik (86) ). Realisasi yang dicapai sebesar B (87,98), yang berarti capainnya mencapai 102,30 % .

**Program** yang dilaksanakan dengan mengelola dana tersebut terdiri dari 4 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

**Realisasi penggunaan** anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 adalah 97,51%. Dari anggaran sebesar Rp. 35.172.238.494,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.811.812.567,00. Yang berarti realisasi anggaran tersebut Efisien.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah akan dipergunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
D. DASAR HUKUM .....	7
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS .....	9
F. ISU-ISU STRATEGIS.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A. RENCANA STRATEGIS.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN.....	16
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023 .....	18
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022-2023 .....	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA.....	23
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 DENGAN KECAMATAN LAIN .....	25
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME) .....	26
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN .....	26
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN.....	26
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	27
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN .....	28
BAB IV PENUTUP .....	30
A. KESIMPULAN .....	30
B. LANGKAH PERBAIKAN .....	31
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (Tabel 5.1 dan 6.1)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2023	

3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja .....	11
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran .....	12
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026 .....	12
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar .....	14
Tabel 2.5 Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2023.....	15
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sannawetan Tahun 2023.....	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan I.....	18
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 .....	22
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	23
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Kecamatan Lain .....	25
Tabel 3.6 Alokasi Sasaran Pembangunan .....	26
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2023 .....	26
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	27
Tabel 3.9 Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2023.....	28
Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LkjIP Kecamatan Sananwetan Tahun 2023....	31



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Kecamatan Sananwetan secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-5 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Kecamatan Sananwetan, yaitu: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat Kecamatan Sananwetan.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut:

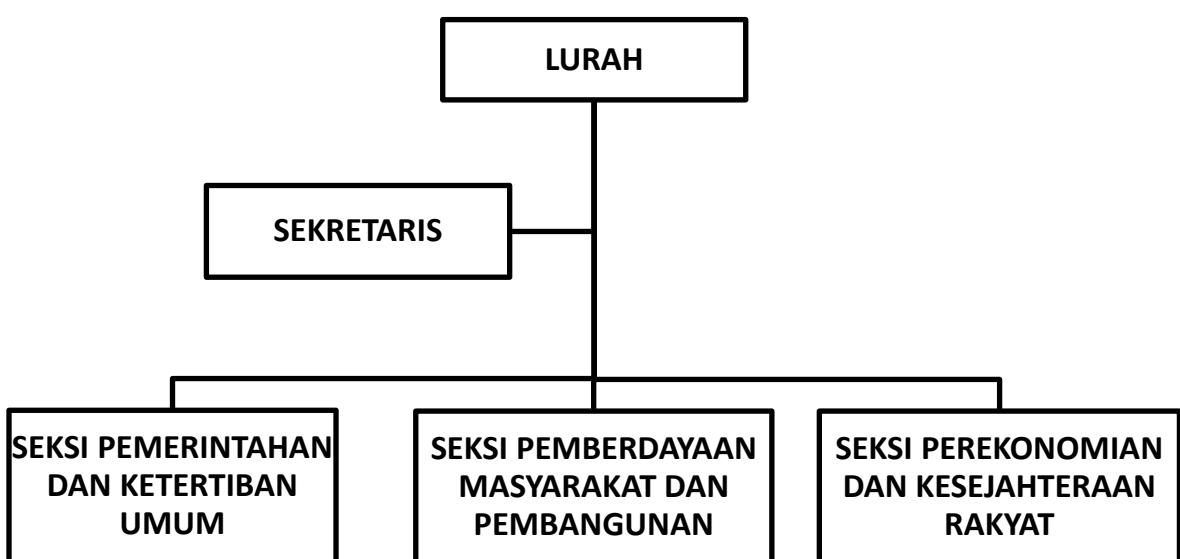
1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;

10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a. Sub bagian Program dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Pelayanan Umum.

**SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN**  
( Perwali Nomor 77Tahun 2016 )



Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;

- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- 1. Lurah;
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- 5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan.Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. Maksud dan Tujuan Laporan ini adalah :

1. Memberikan informasi yang terukur dalam bentuk penyajian data, penggambaran dan penjelasan baik secara kuantitas maupun kualitas kepada Walikota selaku kepala daerah atas kinerja yang dicapai kecamatan Sananwetan.
2. Memotivasi Kecamatan Sananwetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan serta membuat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai Langkah perbaikan yang berkelanjutan menuju peningkatan pelayanan masyarakat dari Kecamatan Sananwetan.
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap semua program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja kecamatan Sananwetan kepada Walikota Blitar sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Sananwetan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka pnyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

### **D. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
  13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
  14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
  16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

#### **E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS**

Aspek – aspek yang menjadi dasar kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sananwetan bersumber dari tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan urusan pelayanan umum.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

#### **F. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi

isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sananwetan antara lain:

1. Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT;
2. Belum optimalnya koordinasi pembangunan Infrastruktur kewilayahannya;
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan;
4. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan.

Dengan mengetahui isu – isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

## BAB 11

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan 2021-2026 mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah : “**KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan, dimana Kecamatan Sananwetan berada pada misi kelima : “**Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**” Mengacu dari misi kelima inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah	<b>A (86,88)</b>
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (86,88)
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<b>Baik (86)</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%
---	------------------------------	-----

Sumber: Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

**Tabel 2.2**  
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

<b>MISI V : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja</li> <li>- Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan system penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan</li> <li>- Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan</li> </ul>

Sumber : Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program / Kegiatan</b>
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sumber : *Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026*

Kecamatan Sananwetan pada Tahun Anggaran 2023 memiliki 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Semua program dan kegiatan bertujuan untuk menunjang atau mewujudkan tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sananwetan.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 4  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (86)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%
3	Meningkatnya Kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,88)
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	97%
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%

		2.Persentase RT Berdaya	75%
7	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%

Sumber : dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2023

Adapun anggaran program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sananwetan selama Tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 5  
Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	845.294.786	778.618.887	92,11%
2	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.572.077.287	17.539.291.846	99,81%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	554.160.826	552.527.426	99,71%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	16.200.705.595	15.941.374.408	98,40%
<b>Total</b>		<b>35.172.238.494</b>	<b>34.811.812.567</b>	<b>97,51%</b>

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2023

## **BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN**

Landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

**Tabel 3. 1**  
**Pencapaian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2023**

<b>Kinerja Utama / Sasaran Strategis / Kinerja Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>Baik (86)</b>	<b>Baik (87,98)</b>	<b>102,30%</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	98,63%	101,68%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%	100%	133,33%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,88)	A (85,13)	97,99%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	97%	95,51%	98,46%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase RT berdaya	75%	100,00%	133,33%

*Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2023*

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Sananwetan atas berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh seksi diperoleh nilai sebesar 87,98 yang berarti memiliki nilai dengan predikat BAIK.

## **1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023**

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Utama**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (86)	Baik (87,98)	102,30%

*Sumber: Hasil Survey Kepuasan Kecamatan Sananwetan Tahun 2023*

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” bernilai baik (87,89). Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal itu, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat yang menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan. Maka pada setiap tahunnya Kecamatan Sananwetan rutin melakukan pengukuran kualitas pelayanan publiknya melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada tribulan I dan Tribulan II.

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2023 memiliki mutu pelayanan B, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai SKM 87,89.

Sedangkan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja (sasaran strategis) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penjelasan atas capaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan**

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang kedua ini adalah Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan, Pada Tahun 2023, realisasi dari

kinerja indikator tersebut sebesar 98,63% dimana capaian yang didapat adalah 101,68% yang artinya antara target dan realisasi memiliki nilai yang sama.

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran II ini, terdapat 1 (satu) program di dalamnya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Indikator Kinerja dari Program tersebut yaitu Persentase layanan Kecamatan tepat waktu. Pada tahun 2023, telah ditetapkan target kinerja sebesar 97% dan pada akhir tahun 2023 didapat hasil realisasi capaian kinerja sebesar 95,51%. Disini dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang didapat sebesar 98,46%. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa target dan realisasi dari indikator kinerja program tersebut belum terlaksana sesuai perencanaan di awal tahun.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung :** Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Sananwetan telah memadai. Juga pemeliharaan rutin yang dilakukan dengan baik terhadap *Software* maupun *hardware* yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu Kecamatan Sananwetan juga mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Improvisasi terhadap perkembangan jaman dalam pelayanan di Tahun 2023 yang dilakukan yaitu, Kecamatan Sananwetan memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sananwetan juga syarat dan ketentuannya sehingga masyarakat dimudahkan dengan tidak perlu bolak – balik dalam pengurusan dokumen pelayanan yang secara tidak langsung dapat mempercepat proses layanan.

**Faktor Penghambat :** Kurang optimalnya kompetensi petugas pelayanan dan juga Pejabat penandatangan dokumen pelayanan tidak berada di tempat.

**Upaya Tindaklanjut :** Memanfaatkan Tandatangan Elektronik sebaik mungkin, serta meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan pejabat penandatangan dalam mempergunakan Teknologi Digital demi meningkatkan serta memperbaiki layanan di Kecamatan Sananwetan.

## SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah

Indikator kinerja dari sasaran III adalah presentase kelurahan berdaya, yang dapat diukur dengan perhitungan jumlah kelurahan yang berdaya berbanding dengan jumlah seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan. Dari perhitungan tersebut, didapat hasil sebesar 100% karena seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan telah melakukan pemberdayaan. Sedangkan target dari sasaran ini pada tahun 2023 adalah sebesar 75%. Maka capaian kinerja dari sasaran II ini adalah sebesar 133,33%.

Untuk mendukung sasaran tersebut, terdapat 2 (dua) program di bawahnya yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan Persentase RT berdaya. Indikator pertama dapat dihitung dengan membandingkan antara koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ada. Pada tahun 2023, target kinerja dari indicator program ini adalah 100%, dan pada akhir tahun didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana kemudian didapat pula capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja kedua dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah RT yang berdaya dengan jumlah seluruh RT yang berada di Kecamatan Sananwetan. Pada Tahun 2023 target kinerja dari indicator ini adalah 75%. Sedangkan realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi kinerja, maka didapat capaian kinerja sebesar 133,33%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung** : Baik masyarakat dan seluruh sector yang terlibat, bergerak secara cepat dan tanggap dalam melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan terhadap segala permasalahan yang muncul. Kesadaran diri dari masyarakat khususnya RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat sudah semakin tinggi terhadap pentingnya kelurahan yang berdaya.

**Faktor Penghambat** : Masih seringnya muncul ego sectoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat. Permasalahan lain adalah belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

**Upaya Tindaklanjut** : Mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sector yang terkait di lingkup Kecamatan Sananwetan.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard. Dapat diukur dengan membandingkan

koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard dengan jumlah seluruh koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan di Kecamatan Sananwetan. Pada tahun 2023 telah ditetapkan target sebesar 100%. Kemudian berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun 2023 didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana menunjukan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung :** Adanya kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar untuk membahas setiap permasalahan – permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima sector yang ada di Kecamatan Sananwetan.

**Faktor Penghambat :** Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.

**Upaya Tindaklanjut :** Menjaga keharmonisan Hubungan koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi kecamatan dengan baik. Juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2023 mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A (85,13). Hal tersebut dapat dikatakan tidak mencapai target yang yaitu (86,88). Dengan demikian, maka capaian kinerja dari indikator sasaran 1 sebesar 97,99%.

Untuk mendukung terlaksananya sasaran kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) program di bawahnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Indikator dari Program tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2023, Kecamatan Sananwetan mendapat Nilai IKM Internal dengan predikat B (88,60), dimana nilai tersebut berada lebih tinggi dari target yang

telah ditetapkan dengan nilai 83. Jika dihitung lebih lanjut, maka capaian dari indikator kinerja program tersebut sebesar 106,75%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung :** Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Sananwetan telah memadai

**Faktor Penghambat :** Kualitas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kurang baik.

**Upaya Tindaklanjut :** Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

## 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 – 2023

Tabel 3. 3  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Kinerja Utama / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (84)	Baik (86)	Baik (83, 14)	Baik (87, 98)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	99,11 %	98,63%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	75%	100%	100%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (85)	A (86,88)	A (85,06)	A (85,13)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase pelayanan Kecamatan tepat waktu	97%	97%	100%	95,51%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100% 75%	100% 75%	100%	100%
---	--	-------------	-------------	------	------

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2022 dan 2023

Antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 memiliki Kinerja Utama, Kinerja Sasaran, dan Kinerja Program yang sama. Namun, dalam hal pencapaian target kinerja, terdapat sedikit perbedaan. Pada tahun 2022, seluruh target indikator dapat dicapai. Namun, pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) target kinerja sasaran yang tidak tercapai, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan dan juga 1 (satu) target kinerja program yaitu Presentase pelayanan Kecamatan tepat waktu. Walaupun ada 2 (dua) target kinerja yang tidak tercapai, Kinerja Kecamatan Sananwetan masih bisa dianggap baik karena masih terdapat 6 (enam) kinerja lain yang dapat mencapai target bahkan melebihi.

### 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis / Kinerja Program	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2021-2026	Tingkat Kemajuan
		Target	Realisasi		
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>Baik (86)</b>	<b>Baik (87, 98)</b>	<b>Baik (90)</b>	<b>95,56%</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	98,63%	98%	98,98%

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	100%	75%	100%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (86,88)	A (85,13)	A (89,88)	96,67%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase pelayanan Kecamatan tepat waktu	97%	95,51%	98%	98,98%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100%	100%	100%	100%
		75%	100%	75%	100%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa Kinerja Kecamatan Sananwetan keseluruhan memiliki tingkat kemajuan rata – rata sebesar 98,77%. Pada Tahun 2023, terdapat 2 (dua) target kinerja yang tidak tercapai, dan 6 (enam) target kinerja yang tercapai bahkan melebihi.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 dengan Kecamatan Lain

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 dengan Kecamatan Lain

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Kepanjenkidul				Kecamatan Sukorejo				Kecamatan Sananwetan				Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (84)	Sangat Baik (91)	Baik (84,22)	Sangan Baik (91)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,11)	Baik (90,26)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (83,14)	Baik (87,98)	-	-	-	Baik (87,99)
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Presentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	97%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	99,11%	98,63%	-	-	-	-
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (85)	A (85,5)	A (85,09)	A (85,31)	A (84,76)	A (84,76)	A (85,00)	A (85,16)	A (85)	A (86,88)	A (85,06)	A (85,13)	-	-	BB (78,73)	BB (79,05)
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	75%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	-	-	-	-
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamata Sananwetan	A (85)	A (85,5)	A (85,5)	A (85,31)	A (84,76)	A (84,76)	A (85,00)	A (85,16)	A (85)	A (85,06)	A (85,06)	A (85,13)	-	-	-	-

## B. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sananwetan.

### 1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Alokasi Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	16.200.705.595	46,06%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	845.294.786	2,40%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	18.126.238.113	51,54%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2023

### 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 Kecamatan Sananwetan didukung dengan anggaran 2023 sebesar Rp 35.172.238.113,00 dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 97,51% yaitu sebesar 34.811.812.567,00. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sananwetan telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun rincian realisasi anggaran di Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKATO R KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TAR GET	REAL ISASI	CAP AIA N		PAGU	REALISASI	CAP AIA N
1	Meningkat nyata kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan	A (86, 88)	A (85,1 3)	97,9 9%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT	845.294.786	778.618.887	92,1 1%

		Sananwetan				AHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97 %	98,63 %	101, 68%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.572.077 .287	17.539.291 .846	99,8 1%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	75 %	100 %	133, 33%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	554.160.826	552.527.426	99,7 1%
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.200.705 .595	15.941.374 .408	98,4 0%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2023

### 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	97,99%	92,11%	1,06
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	101,68%	99,81%	1,02
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	133,33%	99,05%	1,35

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya :

- Sasaran Strategis 1** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,06 hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 97,99% dilaksanakan

- dengan anggaran sebesar 92,11 %. Faktor pendorong efisien nya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu kualitas manusia yang mumpuni dalam memanfaatkan ketersediaan anggaran yang tersedia seminimal mungkin dengan memberikan kinerja yang semaksimal mungkin.
2. **Sasaran Strategis 2** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,02 hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,68% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,81 %. Faktor pendorong efisien nya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu kualitas manusia yang mumpuni dalam memanfaatkan ketersediaan anggaran yang tersedia seminimal mungkin dengan memberikan kinerja yang semaksimal mungkin.
  3. **Sasaran Strategis 3** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,35 hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 133,33% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,05 %. Faktor pendorong efisien nya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu kualitas manusia yang mumpuni dalam memanfaatkan ketersediaan anggaran yang tersedia seminimal mungkin dengan memberikan kinerja yang semaksimal mungkin.

### C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2023 Kecamatan Sananwetan telah mendapatkan prestasi/ penghargaan dan prestasi. Penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2023

No.	Penghargaan	Tingkat	Tahun Perolehan
1	Juara 1 Pemungutan PBB-P2 (Kecamatan Sananwetan)	Pemerintah Kota Blitar	2023
2	Juara 3 Penghargaan Kinarya Praja 2023 (Kecamatan)	Pemerintah Kota Blitar	2023
3	Juara 3 Lomba Verlap Bank Sampah (Bank Sampah Sumber Makmur Kelurahan Rembang)	Pemerintah Kota Blitar	2023
5	Juara 2 Kirab Gunungan Lima dalam Rangkaian Grebeg Pancasila (Kecamatan)	Pemerintah Kota Blitar	2023

6	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Madya (Kelurahan Gedog)	Propinsi Jawa Timur	2023
7	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Pratama (Kelurahan Sananwetan)	Propinsi Jawa Timur	2023
8	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Madya (Kelurahan Karangtengah)	Propinsi Jawa Timur	2023
9	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Pratama (Kelurahan Rembang)	Propinsi Jawa Timur	2023
10	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri (Kelurahan Klampok)	Propinsi Jawa Timur	2023
11	Paralegal Justice Awward NON LITIGATION PEACEMAKER dan ANUBHAWA SASANA DESA JAGADDHITA (Kelurahan Plosokerep)	Nasional	2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **a. KESIMPULAN**

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun 2023 mampu merealisasikan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan Sananwetan Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

##### **1. Kinerja Utama :**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Dengan target “BAIK” (86) dan terealisasi dengan nilai “BAIK” (87,98). Sehingga pencapaian nya sebesar 102,30%.

##### **2. Sasaran I**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Dengan Indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan.

Target : 97%

Realisasi : 98,63%

Capaian kinerja : 101,68%

##### **3. Sasaran II**

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah. Dengan Indikator Persentase kelurahan berdaya.

Target : 75%

Realisasi : 100%

Capaian kinerja : 133,33%

##### **5. Sasaran III**

Meningkatnya kinerja perangkat daerah. Dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan.

Target : A (86,88)

Realisasi : A (85,13)

Capaian kinerja : 97,99%

Realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 adalah 97,51 %. Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat

digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam jalur pewujudan ***Good Governance***.

### b. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sananwetan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sananwetan Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi yang layak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya			✓
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Kegiatan Penyelenggaraan	✓		

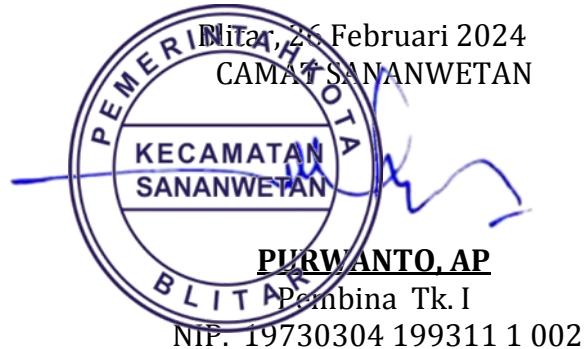
No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		masyarakat	<p>Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan</li> </ul>			
		Mengintegrasikan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan berbasis IT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</li> <li>- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan</li> </ul>			✓
2	Mengoptimalkan koordinasi	Membangun jejaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemberdayaan</li> </ul>	✓	✓	✓

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	pembangunan infrastruktur kewilayahan	komunikasi yang efektif dan efisien baik dengan masyarakat maupun OPD terkait	Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
			Melakukan pembangunan yang terintegrasi dan saling terhubung antara Kecamatan dan Kelurahan dengan program EPIC Sananwetan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	√	√
3	Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok masyarakat kecamatan di	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat	- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√	√	√
			Melakukan pendataan dan juga penjaringan kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√	√
4.	Mengoptimalkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam hal pendataan masalah kesejahteraan	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		sosial	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
		Rutin mengupdate data di level kelurahan dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> <li>- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</li> <li>- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>	√		√

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2023, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih saying-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.



**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SANNAWETAN KOTA BLITAR  
TAHUN 2021-2026**

Visi	: Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat											
Misi V	: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi											
TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDI SI AWAL	TAR GET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULAS I PERHITUN GAN	KONDIS I AWAL	TAR GET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik (81)	Baik (86)	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kecamata n	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	97%	97%	Peningkatan sistem penyelenggar aan pelayanan publik	Perbaikan sarana dan prasarana pelayan publik serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik	-
					Meningkat nya kualitas pembangun wilayah	Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan berdaya / jumlah kelurahan) x 100%	75%	75%	Peningkatan dukungan fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	-

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	A (83,89)	A (86,88)	Meningkat nya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	A (83,89)	A (86,88)	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas administrasi di Kecamatan dan Kelurahan	-
---	--	---	-----------	-----------	--	---	---------------------------------------	-----------	-----------	--	--	---

Blitar, Desember 2023

CAMAT SANANWETAN

KECAMATAN SANANWETAN

PURWANTORAJA

Pembina Tk.I

NIP 19730304 199311 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2023**  
**KECAMATAN SANANWETAN**

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan</b>	<b>A (86,88)</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Baik (83)</b>	<b>16.200.705.595,00</b>	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>51.087.676,00</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8.982.432	Kecamatan Sananwetan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.203.370	Kelurahan Gedog
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.100.017	Kelurahan Plosokerep
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	324.133	Kelurahan Klampok
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.579.393	Kelurahan Sananwetan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.150.410	Kelurahan Rembang

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.836.500	Kelurahan Karang Tengah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.502.500	Kelurahan Bendogerit
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 dokumen	28.632.921	Kecamatan Sananwetan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 dokumen	1.776.000	Kelurahan Bendogerit
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>PersentasePelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standart</b>	<b>100%</b>	<b>9.214.307.983,00</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	9.205.259.305	Kecamatan sananwetan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 dokumen	401.666	Kelurahan Gedog
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 dokumen	1.049.832	Kelurahan Plosokerep
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 dokumen	750.602	Kelurahan Klampok

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	1.561.616	Kelurahan Sananwetan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5 dokumen	2.441.500	Kelurahan Rembang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	1.340.962	Kelurahan Karangtengah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5 dokumen	1.502.500	Kelurahan Bendogerit
	<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian</b>	<b>80%</b>	<b>444.950.584,00</b>	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	150 orang	180.241.699	Kecamatan Sananwetan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	60 orang	21.585.497	Kelurahan Gedog
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	108 orang	15.691.690	Kelurahan Plosokerep
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	10 orang	21.357.300	Kelurahan Klampok
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	76 orang	24.057.304	Kelurahan Sananwetan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100 orang	16.324.482	Kelurahan Rembang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	13 orang	20.014.600	Kelurahan Karangtengah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	160 orang	44.656.712	Kelurahan Bendogerit

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	49.698.800	Kecamatan Sananwetan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	8.727.500	Kelurahan Gedog
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	8.327.500	Kelurahan Plosokerep
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	9.127.500	Kelurahan Klampok
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	9.927.500	Kelurahan Sananwetan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 paket	7.232.500	Kelurahan Rembang
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	7.980.000	Kelurahan Karangtengah
	<b>Admininstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>648.134.213,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.364.390	Kecamatan sananwetan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.476.250	Kelurahan Gedog
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.909.801	Kelurahan Plosokerep
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.937.026	Kelurahan Klampok

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.533.464	Kelurahan Sananwetan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.508.956	Kelurahan Rembang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.649.962	Kelurahan Karangtengah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.246.092	Kelurahan Bendogerit
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	30.709.381	Kecamatan sananwetan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	9.146.099	Kelurahan Gedog
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	10.186.472	Kelurahan Plosokerep
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	13.816.973	Kelurahan Klampok
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	15.143.868	Kelurahan Sananwetan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	12.505.247	Kelurahan Rembang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.027.388	Kelurahan Bendogerit
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	28.179.374	Kecamatan sananwetan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10.055.791	Kelurahan Gedog

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.629.854	Kelurahan Plosokerep
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5.929.188	Kelurahan Klampok
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	4.259.736	Kelurahan Rembang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dna perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	13.674.172	Kelurahan Karangtengah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	20.720.170	Kelurahan Karangtengah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	8.918.574	Kelurahan Bendogerit
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	83.013.000	Kecamatan sananwetan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	9.988.700	Kelurahan Gedog
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	17.620.500	Kelurahan Plosokerep
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.599.164	Kelurahan Klampok
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.090.000	Kelurahan Sananwetan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	13.804.000	Kelurahan Rembang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	15.371.500	Kelurahan Karangtengah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.502.500	Kelurahan Bendogerit
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.380.292	Kecamatan sananwetan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.989.897	Kelurahan Gedog
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.246.316	Kelurahan Plosokerep
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.630.443	Kelurahan Klampok

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.409.260	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.425.127	Kelurahan Rembang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.067.707	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.265.703	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	9.250.200	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	5.400.000	Kelurahan Gedog
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Plosokerep
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Klampok
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	7.680.000	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Rembang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.900.000	Kelurahan Karangtengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	100.971.676	Kecamatan sananwetan

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang tersedia sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>3.870.511.146</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 unit	40.730.720	Kecamatan sananwetan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	18.342.072	Kelurahan Sananwetan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	53.054.050	Kelurahan Plosokerep
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	41.354.536	Kecamatan sananwetan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	4 Unit	27.956.717	Kelurahan Gedog
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 unit	59.903.782	Kelurahan Bendogerit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 unit	25.803.136	Kelurahan Sananwetan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 unit	33.712.000	Kelurahan Karangtengah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	6 Unit	59.487.922	Kelurahan Plosokerep
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Unit	45.900.000	Kelurahan Klampok
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	48.518.528	Kelurahan Rembang
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.415.747.683	Kecamatan sananwetan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>1.107.716.012,00</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	57.814.168	Kecamatan sananwetan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	46.180.000	Kelurahan Gedog
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	25.200.144	Kelurahan Plosokerep

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	32.008.213	Kelurahan Klampok
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	17.042.116	Kelurahan Sananwetan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12.827.267	Kelurahan Rembang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12.087.944	Kelurahan Karangtengah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	18.970.000	Kelurahan Bendogerit
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	876.886.160	Kecamatan sananwetan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	600.000	Kelurahan Gedog
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.200.000	Kelurahan Plosokerep
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.200.000	Kelurahan Klampok
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	1.800.000	Kelurahan Sananwetan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.200.000	Kelurahan Rembang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Karangtengah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	900.000	Kelurahan Bendogerit

		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase BMD yang terpelihara sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>863.997.981,00</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	113.852.527	Kecamatan sananwetan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6.435.600	Kelurahan Gedog
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	9.532.195	Kelurahan Plosokerep
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	10.507.100	Kelurahan Klampok
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	9.337.792	Kelurahan Sananwetan

	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	10.037.100	Kelurahan Rembang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7.936.600	Kelurahan Karangtengah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	15.893.400	Kelurahan Bendogerit
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	64 unit	3.600.000	Kecamatan sananwetan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	32.865.517	Kecamatan sananwetan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	7.143.700	Kelurahan Gedog
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	15.958.000	Kelurahan Plosokerep
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	15.041.000	Kelurahan Sananwetan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	15.271.700	Kelurahan Rembang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 unit	15.419.800	Kelurahan Karangtengah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	18.590.800	Kelurahan Bendogerit
	Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	240.025.000	Kecamatan sananwetan
	Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Kelurahan Plosokerep

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	82.423.000	Kelurahan Karangtengah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.245.212	Kelurahan Rembang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Kelurahan Bendogerit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	186.000.000	Kecamatan sananwetan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4.131.600	Kelurahan Klampok
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.200.000	Kelurahan Plosokerep
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	18.550.338	Kelurahan Rembang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase layanan kecamatan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>845.294.786,00</b>

		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>845.294.786,00</b>	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 dokumen	4.448.240	Kecamatan sananwetan
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.161.756	Kelurahan Gedog
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.243.105	Kelurahan Plosokerep
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	3.306.947	Kelurahan Klampok
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	2.575.712	Kelurahan Sananwetan
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	4.396.243	Kelurahan Rembang
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.876.812	Kelurahan Karangtengah
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.104.908	Kelurahan Bendogerit

			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	367.683.272	Kecamatan sananwetan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	98.664.873	Kelurahan Gedog
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	82.502.030	Kelurahan Bendogerit
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	111.004.622	Kelurahan Sananwetan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	52.431.472	Kelurahan Karangtengah
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	46.820.853	Kelurahan Plosokerep
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	36.073.941	Kelurahan Klampok
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.000.000	Kelurahan Rembang
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>17.572.077.287,00</b>	
				<b>Persentase RT berdaya</b>	<b>75%</b>		
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>16.470.694.242,00</b>	

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga	54.031.623,00	Kecamatan Sananwetan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga	36.730.302	Kelurahan Gedog
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 lembaga	52.747.036	Kelurahan Bendogerit
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 lembaga	68.993.120	Kelurahan Sananwetan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembag	30.870.982	Kelurahan Karangtengah
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 lembaga	22.940.919	Kelurahan Plosokerep

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 lembaga	55.320.687	Kelurahan Klampok
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 lembaga	18.750.053	Kelurahan Rembang
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	788.792.240	Kecamatan Sananwetan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	2.972.084.500	Kelurahan Gedog
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78 pokmas / ormas	2.710.269.171	Kelurahan Bendogerit
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	3.595.213.427	Kelurahan Sananwetan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	2.133.151.350	Kelurahan Karangtengah
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47 Pokmas / Ormas	1.413.272.473	Kelurahan Plosokerep
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	1.545.460.359	Kelurahan Klampok
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	972.066.000	Kelurahan Rembang

		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Percentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>1.101.383.045</b>	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga	147.715.822	Kecamatan Sananwetan
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	67.785.455	Kelurahan Gedog
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga	126.733.483	Kelurahan Bendogerit
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	192.610.040	Kelurahan Sananwetan
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga	62.234.623	Kelurahan Karangtengah
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga	73.068.359	Kelurahan Plosokerep
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyara	75.047.586	Kelurahan Klampok
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga	85.797.100	Kelurahan Rembang
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	127.610.461	Kecamatan Sananwetan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3.180.000	Kelurahan Gedog
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	14.028.354	Kelurahan Plosokerep

		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	42.785.166	Kelurahan Klampok
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	11.283.126	Kelurahan Sananwetan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15.507.354	Kelurahan Rembang
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	29.687.695	Kelurahan Karangtengah
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	26.308.421	Kelurahan Bendogerit
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>554.160.826</b>	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>554.160.826,00</b>	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1080 Orang	244.273.986	Kecamatan Sananwetan

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 Orang	43.962.673	Kelurahan Gedog
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	554 orang	43.153.014	Kelurahan Plosokerep

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	239 Orang	28.157.709	Kelurahan Klampok
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	145 Orang 0 Orang	77.353.532	Kelurahan Sananwetan

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang	40.757.263	Kelurahan Rembang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1200 Orang	36.515.449	Kelurahan Karangtengah	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85 Orang	39.987.200	Kelurahan Bendogerit
<b>TOTAL</b>						<b>35.172.238.494,00</b>



# PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWANTO,AP**  
Jabatan : CAMAT SANANWETAN KOTA BLITAR  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd.**  
Jabatan : WALIKOTA BLITAR  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. SANTOSO, M.Pd.



Bilantara, 20 Oktober 2023  
Pihak Pertama,  
**PURWANTO,AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197303041993111002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA/KINERJA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (86)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%
3	Meningkatnya Kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,88)
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	97%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT Berdaya	75%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	845.294.786	PAD
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.572.077.287	DAU dan PAD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	554.160.826	PAD
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	16.200.705.595	DAU dan PAD
<b>JUMLAH</b>		<b>35.172.238.494</b>	



Drs. SANTOSO, M.Pd.



Camat Sananwetan  
**PU'RWANTO, AP**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

**PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Kecamatan Sananwetan

Tahun : 2023

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>KET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai SAKIP pada tahun berkenaan	A (86,88)	A (85,13)	97,99%	Tidak Tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	845.294.786	778.618.887	92,11%	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standart : Jumlah seluruh pelayanan) x 100%	97%	98,63%	101,68%	Tercapai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.572.077.287	17.539.291.846	99,81%	Tercapai
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang berdaya : Jumlah seluruh kelurahan) x 100%	75%	100%	133,33%	Tercapai	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	554.160.826	552.527.426	99,71%	Tercapai
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.200.705.595	15.941.374.408	98,40%	Tercapai

